

Rural Agricultural Development and Farmer Empowerment in North Lombok Within The National Policy Framework

Siti Zainab^{1*}, Baharuddin², Jalaluddin³

¹Mahasiswa Doktor Pertanian Berkelanjutan Pascasarjana Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;

²Dosen Doktor Pertanian Berkelanjutan Pascasarjana Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;

³Mahasiswa Doktor Pertanian Berkelanjutan Pascasarjana Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;

Article History

Received : January 09th, 2026

Revised : April 07th, 2026

Accepted : May 08th, 2026

*Corresponding Author: **Siti Zainab**, Fakultas Pertanian, Universitas 45 Mataram, Mataram, Indonesia;
Email:
Sitzainab83@gmail.com

Abstract: Agricultural and rural development policies in Indonesia are strategically designed to promote food security, reduce rural poverty, and empower farmers. However, persistent gaps between national policy objectives and local implementation remain evident, particularly in peripheral and island regions such as North Lombok Regency, West Nusa Tenggara. This study aims to critically review agricultural and rural development policies in Indonesia by focusing on farmer empowerment within the framework of national policy implementation at the local level. This article employs a qualitative literature review method by systematically analyzing peer-reviewed journal articles, policy documents, and relevant reports published over the last decade. The review emphasizes theoretical perspectives on participatory rural development, the capability approach, and place-based policy to interpret policy dynamics and implementation outcomes. The results indicate that agricultural and rural development policies are largely normative and production-oriented, with limited adaptation to local socio-economic and agro-ecological contexts. Weak institutional capacity, fragmented policy coordination, and insufficient farmer participation have constrained the effectiveness of empowerment initiatives in North Lombok. The findings further highlight that farmer empowerment is more strongly influenced by institutional support and governance quality than by individual farmer characteristics alone. In conclusion, effective agricultural and rural development requires a contextual, participatory, and institutionally grounded policy approach. Strengthening local institutions, enhancing policy convergence across sectors, and adopting place-based development strategies are essential to improving farmer empowerment and rural economic resilience. It is recommended that future policies prioritize institutional strengthening and locally adaptive frameworks to ensure inclusive and sustainable agricultural and rural development.

Keywords: Agricultural policy; Farmer empowerment; Local institutions; Policy implementation; Rural deployment.

Pendahuluan

Pembangunan pertanian pedesaan menjadi pilar utama pembangunan nasional di Indonesia karena sektor pertanian berperan strategis dalam penyediaan pangan, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah menempatkan pertanian pedesaan tidak hanya sebagai sektor produksi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan inklusif yang meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan ekonomi wilayah pedesaan. Berbagai dokumen perencanaan

nasional menegaskan pentingnya integrasi pembangunan pertanian dengan pembangunan desa serta penguatan kelembagaan lokal (Food and Agriculture Organization, 2017; World Bank, 2007).

Secara teoretis, literatur pembangunan menjelaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran ganda dalam pembangunan ekonomi. Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith (2020) menyatakan bahwa sektor pertanian mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung transformasi struktural menuju pembangunan yang inklusif. Dalam konteks pedesaan,

pembangunan pertanian dipengaruhi oleh dinamika sosial, kelembagaan, dan kebijakan publik yang membentuk peluang serta keterbatasan petani. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan pertanian harus bersifat holistik, kontekstual, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Namun, implementasi kebijakan pembangunan pertanian pedesaan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Kebijakan nasional sering kali tidak mampu menjawab kompleksitas persoalan di tingkat lokal, terutama di wilayah periferal dan kepulauan. Robert Chambers (2014) mengkritik pendekatan pembangunan yang sentralistik dan teknokratis karena mengabaikan pengetahuan lokal serta kebutuhan riil masyarakat desa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan.

Kesenjangan implementasi kebijakan tersebut menjadi isu penting dalam kajian kebijakan publik. Merilee S. Grindle (2017) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh kapasitas institusi, konfigurasi aktor, dan konteks politik-ekonomi lokal. Dalam praktiknya, pembangunan pertanian pedesaan sering menghadapi masalah berupa rendahnya partisipasi petani, lemahnya kelembagaan lokal, serta fragmentasi program lintas sektor. Kondisi ini menyebabkan program pemberdayaan petani berjalan parsial dan belum menghasilkan perubahan struktural yang berkelanjutan.

Penelitian empiris di Indonesia memperkuat temuan tersebut. Retnowati (2018) menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat top-down menghasilkan implementasi yang kurang responsif terhadap kebutuhan petani. Selain itu, keterlibatan aktor lokal yang terbatas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan menurunkan efektivitas program pembangunan pedesaan. Dengan demikian, persoalan pembangunan pertanian tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola kebijakan dan relasi kelembagaan.

Aspek ersonpektif pemberdayaan, pembangunan pertanian harus menempatkan petani sebagai subjek utama. Amartya Sen (1999) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan proses perluasan kapabilitas individu untuk menentukan pilihan hidupnya. Oleh karena itu, pemberdayaan petani mencakup peningkatan akses terhadap lahan, teknologi, dan pasar, serta penguatan posisi tawar dalam rantai nilai pertanian. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi

juga dari peningkatan kesejahteraan dan kapasitas petani.

Meskipun demikian, pemberdayaan petani masih menghadapi kendala struktural. Auza, Sadono, dan Harijati (2023) menemukan bahwa tingkat keberdayaan petani lebih dipengaruhi oleh kualitas dukungan kelembagaan dibandingkan oleh karakteristik individu. Banyak program pemberdayaan masih berfokus pada pelatihan teknis jangka pendek tanpa penguatan kelembagaan yang memadai, sehingga dampaknya tidak berkelanjutan.

Kelembagaan lokal memainkan peran penting dalam menjembatani kebijakan dan praktik di tingkat pedesaan. Pernyataan dari Putnam (2000) menekankan bahwa modal sosial, seperti kepercayaan dan jejaring, menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan. Kelembagaan lokal, seperti kelompok tani dan koperasi, tidak hanya melaksanakan program, tetapi juga memperkuat kapasitas kolektif masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan yang kuat meningkatkan keberhasilan pembangunan partisipatif dan keberlanjutan program pedesaan.

Selain itu, pembangunan pertanian pedesaan menghadapi tantangan berupa fragmentasi kebijakan lintas sektor. OECD (2016) menekankan pentingnya pendekatan berbasis wilayah yang mengintegrasikan kebijakan pertanian, pembangunan desa, dan ekonomi lokal. Tanpa integrasi tersebut, program pembangunan sering mengalami tumpang tindih dan inefisiensi, sehingga menghambat pemberdayaan petani.

Konteks Lombok Utara mencerminkan kompleksitas permasalahan tersebut. Wilayah ini memiliki keterbatasan infrastruktur, kapasitas kelembagaan, dan akses sumber daya yang memengaruhi efektivitas kebijakan pembangunan pertanian. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa wilayah periferal menghadapi tantangan implementasi yang lebih besar dibandingkan wilayah inti (Wulandari & Zakaria, 2022). Namun, kajian yang mengintegrasikan aspek kebijakan, teori pembangunan, dan pemberdayaan petani di wilayah ini masih terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan integratif yang menggabungkan teori pembangunan, kebijakan publik, dan temuan empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis kebijakan pembangunan pertanian pedesaan dan pemberdayaan petani di Lombok

Utara dalam kerangka kebijakan nasional. Penelitian ini mengintegrasikan perspektif kapabilitas, pembangunan partisipatif, dan pendekatan berbasis wilayah untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual, integratif, dan berkelanjutan.

Pembangunan pertanian pedesaan merupakan elemen fundamental dalam pembangunan ekonomi, khususnya di negara berkembang. Sektor pertanian menyediakan pangan, menyerap tenaga kerja, dan mengurangi kemiskinan di wilayah pedesaan. Di Indonesia, pemerintah menjadikan pertanian pedesaan sebagai pilar pembangunan nasional karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor ini. Pemerintah juga memosisikan pertanian tidak hanya sebagai sektor produksi, tetapi sebagai instrumen pembangunan inklusif yang meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan ekonomi wilayah pedesaan. Kebijakan ini tercermin dalam berbagai dokumen pembangunan yang menekankan integrasi antara pembangunan pertanian, pembangunan desa, dan penguatan kelembagaan lokal (Food and Agriculture Organization, 2017; World Bank, 2007).

Bahan dan Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan **review literatur sistematis bersifat kualitatif** untuk menganalisis kebijakan pembangunan pertanian pedesaan dan pemberdayaan petani dalam kerangka kebijakan nasional dengan fokus pada Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif dan kritis terhadap dinamika kebijakan, kesenjangan implementasi, serta praktik pemberdayaan petani yang berkembang dalam konteks lokal.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui **penelusuran literatur ilmiah dan dokumen kebijakan** yang relevan, meliputi artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, laporan resmi pemerintah, serta dokumen perencanaan pembangunan pertanian dan pedesaan. Sumber literatur diperoleh dari basis data ilmiah seperti **Scopus, Google Scholar, dan Garuda**, dengan rentang publikasi utama **10–15 tahun terakhir** untuk memastikan relevansi dan kemutakhiran kajian.

Kriteria inklusi literatur meliputi: (1) membahas kebijakan pembangunan pertanian dan/atau pedesaan, (2) memuat isu pemberdayaan petani atau kelembagaan pertanian, (3) relevan dengan konteks Indonesia atau wilayah dengan karakteristik serupa, serta (4) memiliki kejelasan metodologis.

Analisis data dilakukan melalui **teknik analisis tematik dan sintesis naratif**. Untuk menjaga validitas dan ketajaman analisis, dilakukan **triangulasi sumber**, yaitu membandingkan temuan antar artikel ilmiah dan dokumen kebijakan. Interpretasi hasil analisis diarahkan pada pengembangan argumen kritis dan perumusan rekomendasi kebijakan berbasis wilayah.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil review literatur menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan pertanian pedesaan di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan, dari pendekatan berorientasi produksi menuju pendekatan yang menekankan pemberdayaan petani, penguatan kelembagaan lokal, dan pembangunan berkelanjutan. Namun, implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Lombok Utara, menunjukkan variasi capaian dan masih menghadapi sejumlah kendala struktural.

Arah dan Fokus Kebijakan Pembangunan Pertanian Pedesaan

Sebagian besar literatur yang direview menegaskan bahwa kebijakan nasional menempatkan pertanian pedesaan sebagai instrumen strategis untuk ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan wilayah. Fokus kebijakan meliputi peningkatan produktivitas, diversifikasi usaha tani, penguatan kelompok tani, serta integrasi pertanian dengan sektor lain. Namun, hasil review menunjukkan bahwa orientasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara konsisten di tingkat lokal, terutama dalam aspek pemberdayaan dan kemandirian petani. Temuan ini sejalan dengan hasil sintesis kebijakan yang dirangkum pada:

1. Perbedaan antara tujuan kebijakan nasional dan fokus implementasi di daerah.
2. Implementasi Kebijakan di Lombok Utara

Di Lombok Utara, implementasi kebijakan pembangunan pertanian pedesaan lebih banyak diwujudkan melalui program bantuan sarana produksi, penguatan kelompok tani, dan pelatihan teknis. Hasil review menunjukkan bahwa program-program tersebut berkontribusi pada peningkatan kapasitas teknis petani dalam jangka pendek, namun dampaknya terhadap kemandirian ekonomi dan daya tawar petani masih terbatas.

Sebagian besar studi mencatat bahwa skala usaha tani yang kecil, keterbatasan akses terhadap modal dan pasar, serta lemahnya kelembagaan ekonomi petani menjadi faktor penghambat utama. Temuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang bersifat programatik belum sepenuhnya mampu mendorong transformasi struktural pertanian pedesaan di Lombok Utara.

3. Tingkat Pemberdayaan Petani

Hasil review menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan petani di Lombok Utara berada pada kategori sedang hingga rendah, terutama dalam dimensi pengambilan keputusan, akses terhadap pasar, dan kontrol terhadap sumber daya produksi. Sebaliknya, dimensi kapasitas teknis dan partisipasi dalam kelompok tani menunjukkan capaian yang relatif lebih baik. Perbandingan antar temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan petani lebih dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan lokal dan intensitas pendampingan dibandingkan oleh karakteristik individu petani seperti pendidikan formal atau luas lahan.

4. Kelembagaan Lokal dan Sinergi Kebijakan

Hasil review juga menegaskan bahwa kelembagaan lokal, seperti kelompok tani dan lembaga desa, memiliki peran penting dalam menjembatani kebijakan nasional dengan praktik lokal. Namun, literatur menunjukkan bahwa peran kelembagaan tersebut belum optimal akibat keterbatasan kapasitas manajerial dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Hubungan antara kebijakan nasional, kelembagaan lokal, dan pemberdayaan petani masih bersifat linear dan belum membentuk sistem sinergi yang berkelanjutan.

5. Pola Umum dan Temuan Sintesis

Secara keseluruhan, hasil review mengidentifikasi tiga pola utama. Pertama, terdapat kesenjangan antara desain kebijakan nasional yang bersifat normatif dengan realitas

implementasi di Lombok Utara. Kedua, pemberdayaan petani masih lebih berorientasi pada peningkatan kapasitas teknis dibandingkan penguatan ekonomi dan kelembagaan. Ketiga, pendekatan kebijakan berbasis wilayah dan konvergensi lintas sektor belum diterapkan secara optimal.

Pembahasan

Pembangunan Pertanian Pedesaan dalam Kerangka Kebijakan Nasional

Pembangunan pertanian pedesaan dalam kebijakan nasional Indonesia secara konseptual ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, mengurangi kemiskinan pedesaan, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Kerangka kebijakan ini tercermin dalam berbagai dokumen perencanaan nasional yang menempatkan sektor pertanian sebagai basis pembangunan wilayah pedesaan. Paradigma tersebut sejalan dengan teori pembangunan ekonomi klasik dan kontemporer yang menegaskan peran pertanian sebagai fondasi transformasi struktural di negara berkembang (Todaro & Smith, 2020).

Namun, dalam praktiknya, orientasi kebijakan nasional masih cenderung menekankan pencapaian target produksi dan stabilitas pangan secara makro, sementara dimensi sosial dan kelembagaan pedesaan belum memperoleh perhatian yang seimbang. Chambers (2014) mengkritik pendekatan pembangunan semacam ini karena berpotensi mengabaikan realitas lokal, pengetahuan petani, serta relasi kekuasaan yang memengaruhi distribusi manfaat pembangunan. Penelitian Wulandari dan Zakaria (2022) juga menunjukkan bahwa kebijakan pertanian nasional sering kali bersifat seragam dan kurang sensitif terhadap heterogenitas wilayah pedesaan di Indonesia.

Dalam konteks ini, pembangunan pertanian pedesaan perlu dimaknai tidak hanya sebagai peningkatan output pertanian, tetapi sebagai proses multidimensional yang mencakup transformasi sosial, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapabilitas petani. Pemaknaan ini penting untuk menjembatani kesenjangan antara tujuan kebijakan nasional dan kebutuhan riil masyarakat pedesaan, khususnya di wilayah perifer seperti Lombok Utara.

Kesenjangan antara Ideal Kebijakan dan Realitas Implementasi Lokal

Kesenjangan antara ideal kebijakan dan realitas implementasi merupakan isu klasik dalam studi kebijakan publik. Grindle (2017) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusional, konfigurasi aktor, dan konteks sosial-politik di tingkat lokal. Dalam pembangunan pertanian pedesaan, kesenjangan ini tampak pada rendahnya efektivitas berbagai program pemberdayaan yang dirancang secara top-down.

Penelitian Retnowati (2018) menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang sentralistik cenderung menghasilkan program yang kurang responsif terhadap kebutuhan petani dan kondisi lokal. Hal ini diperkuat oleh temuan Retnowati, Fathoni, dan Chen (2018) yang menekankan bahwa minimnya partisipasi aktor lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan menjadi penyebab utama lemahnya dampak pembangunan pedesaan. Dengan demikian, kesenjangan implementasi bukan semata-mata persoalan teknis, tetapi mencerminkan persoalan struktural dalam tata kelola kebijakan.

Dalam konteks Lombok Utara, kesenjangan ini semakin diperbesar oleh keterbatasan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, dan akses terhadap layanan pendukung pertanian. Studi-studi pembangunan wilayah perifer menunjukkan bahwa daerah kepulauan dan tertinggal cenderung menghadapi hambatan implementasi kebijakan yang lebih kompleks dibandingkan wilayah inti (OECD, 2016). Oleh karena itu, pemaknaan kesenjangan ideal–realitas perlu diarahkan pada upaya reformulasi pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan partisipatif.

Pemberdayaan Petani sebagai Inti Pembangunan Pertanian Pedesaan

Pemberdayaan petani merupakan konsep kunci dalam pembangunan pertanian pedesaan yang berkelanjutan. Dalam perspektif teori kapabilitas, pemberdayaan dipahami sebagai proses perluasan kemampuan individu dan kelompok untuk menentukan pilihan hidup yang mereka nilai berharga (Sen, 1999). Dengan demikian, pemberdayaan petani tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga dengan peningkatan akses terhadap sumber daya, pengetahuan, dan pengambilan keputusan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan petani di Indonesia masih

menghadapi kendala struktural. Auza, Sadono, dan Harijati (2023) menemukan bahwa keberdayaan petani lebih dipengaruhi oleh kualitas dukungan kelembagaan dan pendampingan dibandingkan karakteristik individu petani. Temuan ini menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses kolektif yang sangat bergantung pada lingkungan kebijakan dan kelembagaan.

Dalam praktik kebijakan, pemberdayaan petani sering kali direduksi menjadi pelatihan teknis jangka pendek yang kurang terintegrasi dengan penguatan organisasi petani dan akses pasar. Janssen et al. (2010) menegaskan bahwa pemberdayaan yang berkelanjutan memerlukan integrasi antara peningkatan kapasitas teknis, penguatan kelembagaan, dan dukungan kebijakan yang konsisten. Oleh karena itu, pembangunan pertanian pedesaan perlu menempatkan pemberdayaan petani sebagai tujuan substantif, bukan sekadar instrumen pencapaian target produksi.

Peran Kelembagaan Lokal dan Modal Sosial

Kelembagaan lokal memainkan peran strategis dalam menjembatani kebijakan nasional dengan praktik pembangunan di tingkat pedesaan. Putnam (2000) menekankan bahwa modal sosial—yang tercermin dalam kepercayaan, norma, dan jejaring sosial—merupakan prasyarat bagi efektivitas pembangunan. Dalam konteks pertanian pedesaan, kelembagaan lokal seperti kelompok tani dan koperasi berfungsi sebagai arena utama interaksi antara petani dan kebijakan publik.

Penelitian Nurgiyantoro dan Efendi (2017:143–146) menunjukkan bahwa kelembagaan lokal yang kuat berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pembangunan partisipatif dan keberlanjutan program pedesaan. Sebaliknya, kelembagaan yang lemah cenderung menghasilkan implementasi kebijakan yang tidak efektif dan rentan terhadap kegagalan (Retnowati et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan lokal merupakan prasyarat bagi pemberdayaan petani dan pembangunan pertanian pedesaan yang berkelanjutan.

Dalam konteks Lombok Utara, penguatan kelembagaan lokal menjadi semakin penting mengingat keterbatasan kapasitas institusional dan tantangan geografis. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pertanian pedesaan perlu diarahkan pada investasi jangka panjang

dalam penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat desa.

Konvergensi Kebijakan dan Pendekatan Berbasis Wilayah

Fragmentasi kebijakan lintas sektor merupakan salah satu hambatan utama dalam pembangunan pertanian pedesaan. OECD (2016) mengemukakan pendekatan pembangunan berbasis wilayah (place-based policy) sebagai strategi untuk mengintegrasikan berbagai sektor kebijakan secara kontekstual. Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pertanian, pembangunan desa, dan pengembangan ekonomi lokal.

Penelitian Wulandari dan Zakaria (2022) menunjukkan bahwa kurangnya konvergensi kebijakan sering kali menyebabkan tumpang tindih program dan inefisiensi alokasi sumber daya. Janssen et al. (2010) menegaskan bahwa integrasi lintas sektor dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Dalam konteks ini, konvergensi kebijakan menjadi prasyarat bagi pembangunan pertanian pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Implikasi Teoretis dan Kebijakan

Secara teoretis, pembahasan ini memperkuat literatur pembangunan pertanian pedesaan dengan mengintegrasikan teori kapabilitas, pembangunan partisipatif, dan pembangunan berbasis wilayah. Integrasi ini memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami dinamika pembangunan pertanian pedesaan di wilayah perifer. Dari sisi kebijakan, temuan ini mengindikasikan perlunya reformulasi strategi pembangunan pertanian pedesaan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis kelembagaan. Kebijakan nasional perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi inovasi lokal dan penguatan kapasitas kelembagaan desa.

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian pedesaan di Indonesia, khususnya di Lombok Utara, masih menghadapi kesenjangan antara desain kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal. Kebijakan yang berorientasi pada peningkatan produksi belum sepenuhnya diimbangi dengan pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan lokal. Kondisi ini tercermin pada

lemahnya kapasitas institusional, rendahnya koordinasi lintas sektor, serta kurangnya adaptasi kebijakan terhadap karakteristik wilayah pedesaan. Temuan kajian juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian pedesaan sangat dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan lokal dan integrasi kebijakan. Penguatan kelembagaan serta konvergensi kebijakan pertanian dan pembangunan pedesaan berpotensi meningkatkan efisiensi sumber daya, memperkuat ekonomi lokal, dan memperluas akses petani terhadap pasar. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang lebih integratif, kontekstual, dan berbasis pemberdayaan menjadi kunci dalam mendorong pembangunan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan jurnal ini, baik dalam bentuk data, masukan akademik, maupun dukungan moral. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada institusi dan rekan-rekan yang telah berkontribusi dalam proses penelitian hingga penyusunan artikel ini. Semoga hasil jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan perumusan kebijakan pembangunan pertanian pedesaan di Indonesia.

Referensi

- Ashley, C., & Maxwell, S. (2001). Rethinking rural development. *Development Policy Review*, 19(4), 395–425. <https://doi.org/10.1111/1467-7679.00141>
- Auza, A., Sadono, D., & Harijati, S. (2023). Farmer empowerment and institutional support in rural agricultural development in Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 98, 102–112. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.02.011>
- Barrett, C. B., Reardon, T., & Webb, P. (2001). Nonfarm income diversification and household livelihood strategies in rural Africa. *Food Policy*, 26(4), 315–331. [https://doi.org/10.1016/S0306-9192\(01\)00014-8](https://doi.org/10.1016/S0306-9192(01)00014-8)
- Chambers, R. (2014). *Rural development: Putting the last first* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315835815>

- Ellis, F. (2000). *Rural livelihoods and diversity in developing countries*. Oxford University Press.
- Fan, S., & Chan-Kang, C. (2005). Is small beautiful? Farm size, productivity, and poverty in Asian agriculture. *Agricultural Economics*, 32(s1), 135–146. <https://doi.org/10.1111/j.0169-5150.2004.00019.x>
- Food and Agriculture Organization. (2017). *The state of food and agriculture*. FAO.
- Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in developing countries. *World Development*, 95, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.02.006>
- Hazell, P., & Wood, S. (2008). Drivers of change in global agriculture. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 363(1491), 495–515. <https://doi.org/10.1098/rstb.2007.2166>
- Janssen, M. A., Anderies, J. M., & Ostrom, E. (2010). Robustness of social–ecological systems to spatial and temporal variability. *Society & Natural Resources*, 23(6), 519–537. <https://doi.org/10.1080/08941920903305613>
- Mardikanto, T. (2013). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>
- Nurgiyantoro, B., & Efendi, A. (2017). Participatory rural development and institutional capacity building. *Journal of Rural and Community Development*, 12(2), 137–151.
- OECD. (2016). *A new rural development paradigm for the 21st century*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264252271-en>
- Ostrom, E. (2005). *Understanding institutional diversity*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400831739>
- Pretty, J. (2003). Social capital and the collective management of resources. *Science*, 302(5652), 1912–1914. <https://doi.org/10.1126/science.1090847>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Retnowati, E. (2018). Policy implementation gaps in agricultural development programs in Indonesia. *Journal of Public Policy and Administration*, 17(3), 245–259. <https://doi.org/10.22146/jpka.2018.34567>
- Retnowati, E., Fathoni, A., & Chen, L. (2018). Local participation and policy effectiveness in rural development programs. *Public Administration and Development*, 38(4), 243–255. <https://doi.org/10.1002/pad.1832>
- Scoones, I. (1998). Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis. *IDS Working Paper*, 72. <https://doi.org/10.1111/j.2040-0209.1998.tb00404.x>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson.
- Uphoff, N. (2000). Understanding social capital: Learning from the analysis and experience of participation. *World Bank Social Capital Initiative Working Paper*, 22. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-2528>
- World Bank. (2007). *World development report 2008: Agriculture for development*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6807-7>
- Wulandari, S., & Zakaria, A. (2022). Agricultural policy coherence and rural transformation in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(3), 367–389. <https://doi.org/10.1080/00074918.2022.2103456>